



## Cegah Korupsi, Bayar Pajak via Online

**JOGJA.** Radar Jogja - Sektor pajak masih menjadi andalan Pemkot Jogja untuk mendorong pendapatan asli daerah (PAD). Mereka pun berupaya melakukan optimalisasi. Dilakukan dengan menerapkan program monitoring pajak daerah secara online.

Program ini mendorong masyarakat, khususnya wajib pajak, untuk taat membayar pajak melalui pelayanan cepat. Serta sebagai upaya preventif bagi para pengelola pendapatan daerah agar tidak terjerumus ke dalam tindakan koruptif. "Ini adalah upaya peningkatan dan optimalisasi pemungutan pajak daerah," tutur Sekretaris Daerah Kota Jogja Aman Yuriadjaya, dalam Sosialisasi kepada Wajib Pajak Daerah, di Graha Pandawa, Komplek Balai Kota Jogja, kemarin (19/11).

Aman menjelaskan, pajak daerah adalah kewajiban yang harus dipenuhi bagi seluruh wajib pajak di Kota Jogja. Pada hakekatnya kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dikembalikan untuk membangun Kota Jogja secara lebih optimal. Pemkot sendiri telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri, Polresta Jogja, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penerapannya. "Strategi yang dibangun adalah membangun akurasi yang lebih optimal dengan memanfaatkan teknologi untuk memonitoring pajak daerah secara online," jelasnya.

Sedang Kepala Badan Pe-

ngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Wasesa, menyebut Pemkot telah memasang *tapping box* dan *cash online register* atau alat monitoring transaksi usaha secara online. Sudah dipasang di mesin kasir, sejak 2018. Sebelumnya ada 43 *tapping box* untuk diuji coba. Dipasang untuk hotel, restoran, dan tempat hiburan.

Perangkat itu mampu merekam semua transaksi usaha wajib pajak di sektor hotel, restoran, parkir, dan hiburan. "Diharapkan dapat meminimalisir pendapatan pajak yang bocor," tuturnya.

Dewi Sofastuti mewakili Kejaksaan Negeri Jogjakarta menuturkan, pelaporan pajak

dang-undangan perpajakan. "Sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri," paparnya.

Untuk mengantisipasi celah itu diperlukan adanya *pilot project*, misalnya pembayaran dan pengawasan bisa diarahkan secara online dan *real time*. Selain itu, menurutnya, dapat meningkatkan efektivitas waktu dan biaya. Dengan pembayaran secara online, wajib pajak tidak perlu lagi mengantri di bank. "Pada 2017 saat dimunculkan pajak online ada kenaikan kesadaran membayar dan kedisiplinan yang lebih dari wajib pajak," terangnya. (cr16/pr/zl)

dengan prinsip *self assessment* memiliki banyak celah. Prinsip *self assessment* pada dasarnya adalah prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perun-

	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditangga
2	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3	<input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4			



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005